

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu perusahaan atau badan usaha sangat bergantung pada profesionalitas manajemen dalam rangka untuk memajukan dan meningkatkan produktivitas kegiatan usahanya. Peran manajemen dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan laporan-laporan perusahaan khususnya laporan keuangan adalah hal yang sangat penting. Laporan keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan harus akurat dan tepat waktu agar keputusan yang akan dihasilkan lebih tepat sasaran. Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga disinilah laporan keuangan tersebut sangat diperlukan.

Pengertian kualitas pelaporan keuangan saat ini masih beragam, namun pada prinsipnya pengertian kualitas pelaporan keuangan dapat dipandang dalam dua sudut pandang. Pandangan pertama menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tercermin dalam laba perusahaan. Pandangan ini, menyatakan bahwa laba yang berkualitas tinggi terefleksikan pada laba yang dapat berkesinambungan untuk suatu periode tertentu.

Adapun tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan adalah sejumlah mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang, keputusan kontrak yang berdasar kualitas laporan keuangan yang rendah akan mempengaruhi transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan (Hayyuning Tyas, 2011).

Adapun permasalahan atau fenomena yang terjadi terhadap kualitas laporan keuangan.

Perdagangan saham PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS) masih dihentikan sementara (suspense) oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu penyebabnya adalah laporan keuangan yang tidak sinkron dan banyak salah.

Setelah mensuspensi saham INVS, otoritas bursa pun melakukan penelaahan terhadap laporan keuangan perusahaan kuartal III-2014. Dari situ diketahui delapan poin dalam laporan keuangan inovisi mencurigakan. Manajemen inovisi sudah menyanggupi untuk memperbaiki laporan keuangannya tersebut.

Adapun kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan Inovisi :

1. Bagian utang lain—lain kepada pihak terelasi dan pihak ketiga. BEI menilai bagian ini tidak *tie up* dengan informasi yang disajikan pada Catatan Laporan Keuangan (CaLK). Menurut perusahaan jumlah utang lain-lain disajikan pada CaLK nomor 20 halaman 52 yaitu sebesar Rp 58 miliar.
2. Bagian asset tetap. BEI menilai saldo awal asset tetap tidak *tie up* dengan saldo asset tetap pada LK Tahunan 2013 hasil audit. Perseroan akan merevisi bagian ini.
3. Bagian laba bersih per saham. BEI menemukan perusahaan menggunakan “laba periode berjalan” seharusnya menggunakan “laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk” saja, sehingga *overstated*. Perseroan akan merevisi bagian ini.
4. Bagian pembayaran kas kepada karyawan. BEI menemukan adanya salah saji, karena LK Tengah Tahunan, pembayaran kas kepada karyawan mencapai Rp 1,91 triliun, tapi pada periode kuartal III-2014 turun menjadi hanya Rp 59 miliar. Tidak terdapat penjelasan apakah terdapat pengambilan dan karyawan. Perusahaan menyatakan seharusnya tertulis Rp 1,91 miliar bukan triliun.
5. Bagian penerimaan (pembayaran) bersih utang pihak berelasi (laporan arus kas). BEI menemukan adanya indikasi salah saji, berdasarkan laporan posisi keuangan, pelunasan utang berelasi Rp 124 miliar, tapi di laporan arus kas hanya diakui pembayaran Rp 108 miliar. Perusahaan akan merevisi bagian ini.

6. Bagian laporan segmen usaha. BEI menyatakan perusahaan tidak dapat mengalokasikan 45,5% asetnya kepada masing-masing segmen usaha. Perusahaan akan merevisi bagian ini.
7. Bagian jumlah kewajiban. BEI menyatakan bagian ini tidak *tie up* dengan laporan keuangan. Perusahaan akan merevisi bagian ini.
8. Bagian kategori instrument keuangan BEI menyatakan bagian ini tidak *tie up* dengan laporan keuangan tahunan hasil audit. Perusahaan akan merevisi bagian ini.

www.detik.com

PT. Ancora Mining Service (AMS) dilaporkan Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan atas dugaan manipulasi laporan keuangan. AMS merupakan anak perusahaan Ancora Holding yang dimiliki Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain adanya kejanggalan dalam laporan keuangan juga diduga adanya sumbangan yang tidak benar kepada Ancora Foundation.

Ketua Bagian Investigasi FMPK menjelaskan indikasi manipulasi itu terlihat dari adanya penghasilan sebesar Rp 34,9 miliar namun tidak ada pergerakan investasi. Selain itu, ditemukan bukti pembayaran bunga sebesar Rp 18 miliar padahal AMS mengaku tidak memiliki utang. FMPK juga menemukan bukti piutang senilai Rp 5,3 miliar namun tidak ada kejelasan transaksinya. *Business Income*-nya lebih kecil dari *passive income*.

Sedangkan untuk temuan sumbangan, terdapat sumbangan dari PT. Middle East Company (MEC) sebesar 500ribu dolar AS kepada Ancora Foundation. MEC adalah perusahaan pertambangan yang berbasisi Singapura dan Jakarta serta beroperasi di Kalimantan Timur. Ancora Foundation tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari temuan-temuan tersebut, mereka mencurigai adanya praktik transfer pricing. (www.republika.co.id).

Fenomena selanjutnya yaitu menurut Sofyan Djalil (2008), dalam kurun waktu 2004 sampai 2007 terjadi pertumbuhan signifikan pada penjualan (pendapatan) dan aset BUMN. Pada tahun 2004 total penjualan seluruh BUMN berjumlah Rp 520 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 654 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 763 triliun pada tahun 2006, dan menjadi Rp 889 pada tahun 2007. Begitu juga dengan total aset seluruh BUMN berjumlah Rp 1.247 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 1.366 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 1.506 pada tahun 2006, dan menjadi Rp 1.769 pada tahun 2007.

Meskipun terjadi kemajuan secara menyeluruh dalam pengelolaan BUMN di Indonesia, namun bila dicermati lebih dalam ada masalah mendasar dalam proses pembuatan laporan BUMN di Indonesia. Sri Mulyani (2010) pada pengantar seminar *International Financing Reporting (IFRS)* di Jakarta pada tanggal 5 mei 2010 menyatakan bahwa, sebagian besar BUMN di Indonesia belum bisa menyediakan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku.

Hanya sedikit saja BUMN yang membuat laporan keuangan dengan baik dan bisa dihitung dengan jari, seperti PT. Telkom dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Keterlambatan dalam pelaporan keuangan juga menjadi masalah serius pada BUMN di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN Nomor 23/PMK.01/2007 dan Nomor PER-04/MBU/2007 Tentang penyampaian ikhtisar laporan keuangan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang antara lain mengatur kewajiban BUMN untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Negara BUMN yang belum di audit paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya, dan menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit paling lambat tanggal 15 Mei tahun berikutnya. Untuk tahun buku 2008 sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Menteri Negara BUMN, terlihat sampai tanggal 15 april 2009 hanya 95 BUMN (67,61%) yang telah menyerahkan laporan keuangan tahun 2008, sisanya sebanyak 47 BUMN (32,29%) terlambat menyerahkan laporan keuangan tahun 2008) sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/11/02/msv3s4-bpk-pertanyakan-kinerja-bumn>).

Selanjutnya manipulasi laporan keuangan PT. KAI dalam kasus tersebut, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT. KAI tahun 2005, perusahaan

BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar RP 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp 63 miliar. Komisaris PT. KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT.KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT. Kai untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005.

Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporang keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005 (www.antarnews.com).

Dalam mewujudkan sistem perusahaan yang tepat dan baik, dibutuhkannya suatu analisa dan evaluasi. Dimana hal tersebut diharapkan mampu mencegah penyelewengan yang dapat terjadi didalam perusahaan.

Alvin A.Arens dkk dalam buku berjudul Auditing dan Pelayanan Verifikasi (2004 : 396 bahwa suatu sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif mereka meringkas pengendalian internal entitas itu.

Menurut COSO (Sawyer, 2005 : 61) struktur pengendalian intern satuan usaha terdiri atas lima komponen, yaitu : (1) lingkungan pengendalian, (2) penaksiran risiko), (3) informasi dan komunikasi, (4) aktivitas pengendalian, (5) pemantauan. Agar struktur pengendalian intern berfungsi dengan baik, diperlukan penerapan kelima komponen pengendalian intern yang memadai. Sebagaimana telah diketahui bahwa mutu struktur pengendalian ini sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Struktur pengendalian intern yang memadai mengurangi kekeliruan sehingga kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih diandalkan.

Pengendalian intern yang kurang baik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan suatu perusahaan sehingga pengendalian intern menjadi sangat penting dalam suatu perusahaan untuk menjaga kekayaan tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Yeni Denti Utami (2009) yang berjudul “**Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan**”. Pada dasarnya dalam penyusunan laporan keuangan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, terdapat berbagai indikator penting yang sangat berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan salah satunya yaitu Pengendalian internal dan good corporate governance.

Pada penelitian ini peneliti menguji bagaimana pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan peneliti terdahulu pengaruh good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan yang lainnya yaitu pada metode penelitian, peneliti terdahulu menggunakan metode kausal asosiatif sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, dan terdapatnya perbedaan pada dimensi dan indikator variabel independen.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PT. Indah Karya dan PERUMNAS Bandung.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengendalian intern pada PT. Indah Karya dan PERUMNAS.
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada PT. Indah Karya dan PERUMNAS.
3. Seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada PT. Indah Karya dan PERUMNAS.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengendalian intern pada PT. Indah Karya dan PERUMNAS.
2. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pada PT. Indah Karya dan PERUMNAS.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada PT. Indah Karya dan PERUMNAS.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi terkait pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

2. Penulis dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berguna untuk menambah wawasan pemikiran mengenai Pengaruh Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran dan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

4. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.5 Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada dua perusahaan PT. Indah Karya beralamat jalan Golf Raya dan pada PERUMNAS beralamat di jalan Surapati No.120 Bandung.